

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif berarti tepat, manjur, tempat guna, atau dapat dikatakan berhasil dalam melakukan suatu hal, efektif dalam hal ini berarti ketepatan guna atau keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan pada suatu lembaga atau organisasi, efektivitas sangat mempengaruhi hasil belajar.¹

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.² Selain itu efektivitas juga diartikan adanya kesesuaian antara yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang akan dicapai.³

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Jika efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.⁴

Menurut *Jauch* dan *Glueck* efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Akan menentukan efektivitas dalam mengembangkan suatu iklim dan budaya kondusif untuk

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Jurus-jurus Belajar Efektif*, (Yogyakarta : Diva Press, 2009), 68.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/efektivitas>, diakses pada tanggal 10 februari 2018, pada pukul 08:00.

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), 82.

⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 133.

membuat perubahan.⁵ Menurut Engkoswara (2001) bahwa efektivitas merupakan ciri produktivitas pendidikan sebagai suatu kriteria atau ukuran produktivitas pendidikan. Produktivitas pendidikan dapat dilihat dari *output* terhadap pencapaian tujuan, maka suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan sebagaimana yang dikehendaki. Untuk mengukur efektivitas kesuksesan suatu organisasi, program atau aktivitas dalam mencapai suatu tujuan selalu dikaitkan dengan *output*-nya dan tidak mungkin bisa tanpa memperhatikan *outcome*.

Dengan *output* adalah jumlah lulusan, jumlah kasus dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibanding dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran output merupakan pengukuran langsung suatu proses yang menunjukkan hasil program atau aktivitas. Pengukuran *outcome* merupakan pengukuran dampak sosial suatu aktivitas dengan mengukur nilai kualitas dari *output*. Peran setiap variable terhadap tingkat serta naik turunnya produktivitas tidak tetap, melainkan dinamis.⁶

2. Peran Kepala Sekolah

Menurut Piet A. Sahertian peran seorang supervisor yaitu membantu (*Assisting*), dorongan (*Supporting*), dan mengikut sertakan (*Sharing*).⁷ Berkaitan dengan supervisor maka kepala sekolah yaitu membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan, dalam menggunakan sumber, metode, dan alat pelajaran, membantu guru dalam merencanakan proses pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Supervisor merupakan posisi yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yaitu para pendidik atau guru. Supervisor bukanlah seorang *top leader* tetapi menjadi posisi atau peran perantara antara pimpinan dan pekerja, antara dinas /kantor urusan pendidikan dengan para guru di sekolah.

⁵ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep Strategi Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cet I), 129.

⁶ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyuksesan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

⁷ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cet. II), 38.

Jadi, supervisor memposisikan peran sebagai pengawas, pembina, pembimbing bagi para guru sebagai bawahannya. Guru sebagai bawahan para supervisor juga menempatkan posisinya sebagai pendidik yang mempunyai kekurangan atau kemampuan yang masih terpendam sehingga supervisor bisa memberikan motivasi, nasehat dan saran. Namun supervisor bukanlah pemimpin tertinggi sehingga ia bertugas dengan batasan hak, kewajiban dan kewenangan dari atasannya.⁸ Dalam pandangan manajemen, ada lima macam pandangan tradisional tentang peranan keorganisasian seorang supervisor seperti berikut⁹:

Petugas Kunci (<i>Key Man</i>)	Top Management, Supervisor, Pekerja-pekerja
Petugas Marginal (<i>Marginal Man</i>)	Top Management, Supervisor, Pekerja-pekerja
Petugas Tengah (<i>Man in The Middle</i>)	Top Management, Supervisor, Pekerja-pekerja
Pekerja	Top Management, Pekerja-pekerja=Supervisor
Ahli Antar Hubungan Manusia	Top Management, Staf, Supervisor, Manusia, Pekerja-pekerja

Selain itu membentuk guru untuk lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan guru juga termasuk peran kepala sekolah sebagai supervisor.¹⁰ Hendiyat Soetopo menyebutkan bahwa kepala sekolah mempunyai beberapa peran penting yaitu peran pembimbingan. Peran pembimbingan artinya supervisor membimbing guru agar dapat memahami lebih luas masalah dan kebutuhan siswa, serta membantu guru mengatasi masalah, memberikan bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan sifat materinya.

⁸ Kisbiyanto, *Supervisi Pendidikan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, (Kudus : 2008), 31.

⁹ Kisbiyanto, *Supervisi Pendidikan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, (Kudus : 2008), 31.

¹⁰ Nadhirin, *Supervisi Pendidikan Integratif Berbasis Budaya*, STAIN Kudus, (Kudus : Cet. I), 123.

- 1.) Peran memberi bantuan yaitu membantu guru dalam menghadapi kesulitan dalam mengajar, membantu guru memperkaya pengalaman belajar, membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang sesuai dengan sifat materinya.
- 2.) Peran memberikan layanan yaitu memberi pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas.
- 3.) Peran pembinaan yaitu membina moral kelompok, menumbuhkan moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.¹¹

Dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai peranan seorang supervisor, yaitu:

- 1.) Sebagai *koordinator*, supervisor dapat mengkoordinasi program belajar-mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda diantara guru-guru.
- 2.) Sebagai konsultan, supervisor memberikan bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok.
- 3.) Sebagai pemimpin kelompok, seorang supervisor mampu memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan kurikulum, materi ajar dan profesional guru secara bersama.
- 4.) Sebagai *evaluator*, membantu guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan serta mampu menilai dirinya sendiri.¹²

Adapun tugas dalam suatu lembaga peran kepala sekolah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah atau madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai *edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator*.¹³

Adapun peran kepala sekolah dalam suatu lembaga di antaranya adalah :

¹¹ Nadhirin, *Supervisi Pendidikan Integratif Berbasis Budaya*, (Kudus : Cet. I), 121-122.

¹² Piet Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cet.II), 25-26.

¹³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung : Rosdakarya, 2011), 98.

- 1.) Peran kepala sekolah sebagai *edukator* dalam melaksanakan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim yang kondusif, memberikan nasehat kepada seluruh jajaran di sekolah, memberi dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta memberikan model pembelajaran yang menarik.¹⁴
- 2.) Peran kepala sekolah sebagai *manajer* merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.¹⁵
- 3.) Peran kepala sekolah sebagai *administrator* memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan dokumen seluruh program pengajaran. Adapun fungsi pokok dari administrasi seperti dikutip dari Purwanto adalah perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan dan evaluasi.¹⁶
- 4.) Peran kepala sekolah sebagai *supervisor* yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan lainnya, untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan guru-guru, menyeleksi, tujuan-tujuan pendidikan, pengajaran dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran.¹⁷
- 5.) Peran kepala sekolah sebagai *leader* harus mampu memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, meningkatkan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah. Kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter yang mencakup kepribadian,

¹⁴ Muwahid Shulhan, *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*, (Yogyakarta : Teras, 2013, Cet. I), 49.

¹⁵ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), 1.

¹⁶ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014, Cet. I), 14.

¹⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 155.

- keahlian dasar, pengalaman, pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan.¹⁸
- 6.) Peran kepala sekolah sebagai *inovator* akan terlihat dari cara-cara melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, rasional, dan obyektif, keteladanan, disiplin, fleksibel, sekaligus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah.
 - 7.) Peran kepala sekolah sebagai *motivator* melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar.¹⁹

3. Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Menurut Pidarta yang dikutip Sudarwan Danim, Kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapat kepercayaan dan tugas tambahan sebagai pemimpin sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan. Sehingga kegiatan memperbaiki dan meningkatkan program pembelajaran di sekolah sebagian besar terletak pada kepala sekolah.²⁰ Pidarta menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki peran dan tanggung jawab sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidik, supervisi pendidik dan administrator pendidik.²¹ Ada lima kompetensi atau keahlian yang mutlak harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Kelima kompetensi itu meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, sosial, kewirausahaan, dan supervisi.²²

Kompleksnya tugas-tugas sekolah membuat lembaga itu tidak mungkin berjalan dengan baik, tanpa kepala sekolah yang profesional dan inovatif.²³ Sehingga salah satu tugas

¹⁸ Muwahid Shulhan, *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*, (Yogyakarta : Teras, 2013, Cet. I), 55.

¹⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005, Cet. I), 56.

²⁰ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002, Cet.I) ,145.

²¹ Nadhirin, *Supervisi Pendidikan Integratif Berbasis Budaya*, (Kudus : STAIN KUDUS, 2009, Cet. I), 60-61.

²² Farid Mashudi, *Panduan Evaluasi & Supervisi Bimbingan dan Konseling*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013, Cet.I), 166.

²³ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002, Cet. I), 145.

kepala sekolah adalah sebagai supervisor. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor disini adalah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.²⁴ Supervisi ialah suatu aktivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan tugasnya secara efektif. Demikian tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti hendaknya kepala sekolah pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk kemajuan sekolahnya. Sehingga tujuan pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai.²⁵

Kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapat kepercayaan dan tugas tambahan sebagai pemimpin madrasah.²⁶ Dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor, kepala sekolah harus melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian kependidikan. Tepatnya tugas-tugas sekolah membuat lembaga itu tidak mungkin berjalan dengan baik, tanpa kepala sekolah yang profesional dan berjiwa inovatif.²⁷

Kepala sekolah merupakan pemimpin pada sebuah lembaga madrasah. Jenis kepemimpinan dipilih untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi sekolah. Penerapan jenis kepemimpinan ini dalam rangka mendukung kesuksesan peran kepemimpinan, manajerial dan pengajaran kepala sekolah.²⁸ Secara umum kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor yaitu: membangkitkan dan merangsang para guru dan pegawai sekolah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan kepala sekolah sebagai proses belajar mengajar, bersama para guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar lebih baik dengan tuntutan

²⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005, cetakan V), 111.

²⁵ Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, Cetakan XXII), 91.

²⁶ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002, Cet. I), 145.

²⁷ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002, Cet. I), 145.

²⁸ Supardi, *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktisnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013, 27).

kurikulum yang sedang berlaku, membina kerjasama yang baik dan harmonis diantara para guru dan pegawai sekolah, berusaha meningkatkan mutu dan pengetahuan para guru dan pegawai sekolah, membina hubungan kerja sama antara sekolah dengan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.²⁹

Kepala sekolah diharapkan dapat melakukan supervisi yang didasarkan pada metode teknik yang tepat sesuai yang didasarkan pada metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan konselor. Supervisi adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan analisis, dan penggunaan informasi untuk mengontrol manajemen dan pengambilan keputusan.³⁰ Oleh karena itu supervisi bukan semata-mata suatu “*position*” (kedudukan), akan tetapi sebagai “*function*” (tugas). Di dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah selain pengawasan, kepala sekolah juga mendapat tugas sebagai supervisor yang diharapkan dapat setiap kali berkunjung ke kelas dan mengamati kegiatan guru yang sedang mengajar.³¹

a. Pengertian Supervisi

Supervisi secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *super* dan *vision*. Kata *super* maknanya peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan *vision* maknanya kemampuan, untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan dua unsur pembentukan kata supervise tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan, pengamatan yang dilakukan atasan (yang memiliki kelebihan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di bidangnya) terhadap bawahan atau staf-stafnya.³²

Supervisi merupakan serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional

²⁹ Muwahid Shulhan, *Model Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*, (Yogyakarta : Teras, 2013), 54.

³⁰ Farid Mashudi, *Panduan Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013), 18-21.

³¹ Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 14.

³² Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan, Tinjauan Teori dan Praktek*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2014), 12.

yang dilakukan oleh supervisor (pengawasan sekolah, kepala sekolah, dan pembinaan lainnya) guna meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Supervisi dapat diartikan suatu pembinaan. Sedangkan sasarannya bisa untuk kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha. Namun yang menjadi sasaran supervisi diartikan pula pembinaan guru.³³ Pembinaan guru tersebut ditekankan pada “pembinaan profesional guru”, yakni pembinaan yang diarahkan pada upaya memperbaiki dan meningkatkan keprofesionalan guru.

Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di sekolah maupun di kantor-kantor memerlukan adanya supervisi. Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁴ Seseorang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Aktivitas pembinaan ini penting dilakukan karena merupakan salah satu usaha supervisor atau kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran di sekolah.³⁵

Supervisi ialah suatu aktivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan tugasnya secara efektif. Demikian tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti hendaknya kepala sekolah pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk kemajuan sekolahnya. Sehingga tujuan pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai.³⁶ Supervisi pendidikan adalah segala hal yang dilakukan oleh personalia sekolah untuk memelihara atau mengubah apa yang dilakukan sekolah

³³ Nadhirin, *Supervisi Pendidikan Integratif Berbasis Budaya*, STAIN Kudus, (Kudus : 2009, Cet. I), 60-61.

³⁴ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014, Cetakan XXII) ,75-76.

³⁵ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cet. II), 1.

³⁶ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014, Cetakan XXII), 115.

dengan cara yang langsung mempengaruhi proses belajar mengajar dalam usaha meningkatkan belajar. supervisi pendidikan sebagai layanan bantuan yang diberikan kepada para guru dalam melaksanakan tugas pengajaran agar guru dapat membantu para siswa dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.³⁷

Beberapa aspek penting dalam supervisi yaitu: supervisi bersifat bantuan dan pelayanan kepada kepala sekolah, guru dan staf-stafnya, untuk mengembangkan kualitas diri guru, mengembangkan keprofesionalan guru, dan memotivasi guru. Aspek tersebut menuntut pengetahuan tentang konsep dan pendekatan supervisi yang ditunjang dengan kinerja serta akuntabilitas yang tinggi dan supervisor. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan supervisi sebagai layanan profesional dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran pada perwujudan hasil belajar peserta didik yang optimal. Dalam dunia pendidikan dewasa kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor (pengawas) masih berorientasi pada pengawasan administrasi. Sehingga suasana kemitraan guru dan supervisor kurang. Secara psikologis bahkan guru merasa terbebani dengan pemikiran untuk dinilai. Padahal kegiatan supervise akan menjadi efektif jika dilakukan tanpa tekanan, dengan perasaan bebas dan bersifat informal. Dalam pelaksanaannya supervise, bukan sekedar mengawasi apakah guru atau pegawai telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan intruksi dan ketentuan yang telah digariskan, tapi berusaha bersama guru memperbaiki proses pembelajaran.³⁸

b. Tugas Supervisi Pendidikan

Tugas supervisi dalam kegiatan administrasi di antaranya sebagai berikut:³⁹

- 1.) Menyusun dan menetapkan prioritas tujuan umum
- 2.) Menetapkan standar dan mengembangkan kebijakan

³⁷ Nadhirin, *Supervisi Pendidikan Integratif Berbasis Budaya*, STAIN Kudus, (Kudus : 2009, Cet. I.), 61.

³⁸ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru : Memberdayakan Pengawasan Sebagai Gurunya Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 3-4.

³⁹ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru : Memberdayakan Pengawasan Sebagai Gurunya Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 11.

- 3.) Mengadakan rencana jangka panjang
 - 4.) Mendesain struktur organisasi
 - 5.) Mengidentifikasi dan mengamankan sumber-sumber
 - 6.) Memilih personalia dan staf
 - 7.) Mengadakan fasilitas yang kuat
 - 8.) Mengamankan dana yang diperlukan
 - 9.) Mengorganisasikan pembelajaran
 - 10.) Memajukan hubungan sekolah dan masyarakat
- Tugas supervisi pendidikan yang berorientasi kurikulum di antaranya sebagai berikut:⁴⁰

- 1.) Menetapkan tujuan khusus pengajaran
- 2.) Survey kebutuhan dan melakukan riset
- 3.) Mengembangkan program dan merencanakan perubahan
- 4.) Menghubungkan program pada berbagai pelayanan khusus
- 5.) Memilih bahan dan mengalokasikan sumber
- 6.) Orientasi dan penukaran staf pengajar dengan yang baru
- 7.) Menyarankan modifikasi dalam fasilitas
- 8.) Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembelajaran
- 9.) Mempersiapkan program pembelajaran
- 10.) Mengembangkan dan menyebarluaskan uraian program sekolah

Tugas supervisi yang berkaitan dengan pengajaran di antara sebagai berikut.⁴¹

- 1.) Mengembangkan rencana pengajaran
- 2.) Menilai program
- 3.) Memprakarsai program baru
- 4.) Mendesain kembali organisasi pengajaran
- 5.) Menyampaikan sumber-sumber pengajaran
- 6.) Menasehati dan membantu guru-guru
- 7.) Menilai fasilitas dan mengatur modifikasi⁴²

⁴⁰ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru : Memberdayakan Pengawasan Sebagai Gurunya Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 12.

⁴¹ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru : Memberdayakan Pengawasan Sebagai Gurunya Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 11.

c. Tanggung jawab Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor menurut Made Pidarta, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Mengorganisasi dan membina guru, diantaranya yaitu memotivasi guru, membangun hubungan yang harmonis dengan guru, memberi fasilitas dan kesempatan bagi guru agar kinerjanya meningkat.
- 2.) Mempertahankan dan mengembangkan kurikulum, yaitu berkaitan dengan proses pembelajaran yang kondusif.
- 3.) Meningkatkan aktifitas penunjang kurikulum, yaitu melakukan penelitian bersama guru serta menilai mengadakan humas.⁴³

d. Supervisor

Yang dimaksud dengan model dalam uraian diatas ialah suatu pola, contoh acuan dari supervisi yang diterapkan. Ada berbagai model yang berkembang di antaranya sebagai berikut :⁴⁴

- 1.) Umum/akademik ialah harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Inilah karakteristik supervisi akademik. Bahwa hanya ada satu cara terbaik yang diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan perilaku guru. Tingkat kemampuan, kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta karakter seorang guru harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program supervisi akademik.
- 2.) Supervisi Klinis ialah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis, dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta tujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan

⁴²Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru : Memberdayakan Pengawasan Sebagai Gurunya Guru*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 11.

⁴⁴ Luk-luk Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta, Teras, 2009, Cet. I), 31.

membantu pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru.⁴⁵

e. Kebijakan pendidikan

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, istilah *policy* berarti kebijakan. Latin: politeia, pemerintahan *settled course adopted and followed by a government*, (suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan kelompok, dan sebagainya). Polis dalam bahasa Yunani berarti negara kota. *Pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota. *Policie* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.⁴⁶

Menurut Poerwadarminta yang dikutip oleh Rusdiana, kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.⁴⁷

Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui, cerdas, pandai, berilmu. Dengan demikian seseorang yang bijak adalah seorang yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya.⁴⁸

Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu yang dilahirkan dari ilmu kependidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktis pendidikan. Bagi perkembangan individu kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pengembangan pribadinya.

Kebijakan pendidikan menjadi penentu adanya pendidikan. Kebijakan pendidikan harus didukung oleh riset dan pengembangan, supaya dapat berkembang dalam

⁴⁵ Luk-luk Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta, Teras, 2009, Cet. I), 31.

⁴⁶ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015, Cet. I), 31.

⁴⁷ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015, Cet. I), 31.

⁴⁸ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015, Cet. I), 31.

pendidikan. Kebijakan yang baik mempertimbangkan kemampuan lapangan. Oleh sebab itu, pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap, serta dukungan untuk berkembang sebagai kebijakan pendidikan yang efisien.⁴⁹

Duke dan Canady yang di kutip oleh Syafaruddin membentuk kebijakan pendidikan dengan delapan arahan pemaknaan kebijakan, yaitu:⁵⁰

- a. Penegasan maksud dan tujuan
- b. Sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya
- c. Panduan tindakan diskresional
- d. Strategi yang diambil untuk memecahkan masalah
- e. Norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif
- f. Keluaran sistem pembuatan kebijakan
- g. Pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁵¹

Hough yang di kutip oleh Rusdiana menegaskan sejumlah arti kebijakan yang dapat kepada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak belakang dari konseptual ini, misalnya ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena:

- a. Mencapai seperangkat tujuan
- b. Senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan
- c. Program pemerintah
- d. Seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pendidikan

⁴⁹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, Cetakan II) , 31.

⁵⁰ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cetakan I), 118.

⁵¹ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cetakan I), 118.

- e. Menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan konsekuensi
- f. Dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan aturan lembaga terkait.⁵²

Menurut penelaahan Sektor Pendidikan, kebijakan adalah proses yang dapat menghasilkan informasi teknik sebagai masukan bagi perumusan alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknis. Informasi teknis merupakan suatu satuan pernyataan kebenaran induktif yang didukung oleh kebenaran secara empiris sebagai hasil.⁵³

Dengan demikian, kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Kebijakan tidak hanya memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan sampai penyampaian alternatif terhadap para pembuatan keputusan.⁵⁴

Kebijakan pendidikan mempunyai kendala kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan pertimbangan kaitan pendidikan dengan komponen sosial lain. Kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program. Jadi, kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan lain saling mempengaruhi.⁵⁵ Solusi kebijakan pendidikan berdasarkan Undang-Undang

⁵² A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015, Cet. 1), 46.

⁵³ Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009, Cet. 1), 20.

⁵⁴ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015, Cet. 1), 45.

⁵⁵ Suryadi Ace, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 73.

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:⁵⁶

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi menuju manusia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal dalam budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, kemampuan.
- e. Pembaharuan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen.
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- h. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁷

4. Faktor pendukung dan penghambat peran kepala sekolah

Kepala sekolah memiliki peran dan tanggung jawab sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidik, supervisi pendidik dan administrator pendidik.⁵⁸ Di samping peran kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah juga

⁵⁶ Suryadi Ace, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 73.

⁵⁷ Suryadi Ace, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 219.

⁵⁸ Nadhirin, *Supervisi Pendidikan Integratif Berbasis Budaya*, (Kudus : STAIN KUDUS, 2009, Cet. I), 60-61.

berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan peran kepala sekolah.

a. Faktor pendukung peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membuat kebijakan di antaranya sebagai berikut :

- 1.) Kebijakan menyatakan bahwa sekolah bekerja dalam keadaan efisien dan terselesaikan dengan baik.
- 2.) Kebijakan mempercepat stabilitas, sasaran, dan administrasi.
- 3.) Kebijakan menjamin pengembangan yang matang serta konsistensi dalam keputusan dan prosedur pelaksanaan.
- 4.) Kebijakan lokal harus konsisten dengan sistem kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi sekolah.
- 5.) Kebijakan membantu menjamin bahwa pertemuan menjadi teratur.
- 6.) Kebijakan mempercepat stabilitas dan kelanjutan.
- 7.) Kebijakan memberikan kerangka kerja bagi operasional sekolah.
- 8.) Kebijakan membantu sekolah dalam penilaian pengajaran.⁵⁹

Sebagai pemimpin, keberadaan kepala sekolah menduduki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pimpinan puncak (*top leader*) untuk mengelola seluruh sumber daya yang dapat mendukung pencapaian keunggulan sekolah. Mengacu kepada hasil penelitian terhadap sekolah, menurut *Duke* dan *Canady* di kutip Syafaruddin ada beberapa faktor antara lain :

b. Faktor penghambat berjalannya peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam membuat kebijakan sekolah, antara lain :

- 1.) Tidak melibatkan staf dalam pengambilan keputusan
- 2.) Kurikulum belum terarah
- 3.) Imbalan dan banyak hukuman
- 4.) Keterlibatan orang tua sangat mempengaruhi
- 5.) Peluang bagi pelajar tidak ada, dan
- 6.) Iklim sekolah.⁶⁰

⁵⁹ Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cetakan I), 121.

Sekolah memiliki sejumlah kebijakan, tergantung atas ukuran dan programnya. Banyak kebijakan akan memberikan kerangka kerja bagi keputusan berhubungan dengan kurikulum. Dalam hal ini, keinginan dan kemampuan untuk menyusun kebijakan dan praktisnya pada tingkatan optimal, kemudian bekerja secara efektif dalam pelaksanaannya menuju visi tetapi juga realistis dan diarahkan pada tujuan. Keberhasilan dan pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang pelaksanaan, menjalani administrasi, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya pelaksanaan kebijakan.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti belum menemukan judul yang sama, namun peneliti mendapatkan karya yang relevansinya sama dengan judul penelitian ini. Adapun tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Widodo yang berjudul “Efektivitas Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor di SD N 1 Wonosobo, SD N 5 Wonosobo, dan SD N 6 Wonosobo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala SD N 1 Wonosobo, SD N 5 Wonosobo, dan SD N 6 Wonosobo dalam aspek perencanaan termasuk dalam kategori efektif yaitu ditunjukkan dengan memperoleh hasil efektif. sedangkan pada aspek evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik diperoleh dalam termasuk kategori cukup, hasil tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah di SD N 1 Wonosobo, SD N 5 Wonosobo, dan SD N 6 Wonosobo sudah dapat melaksanakan tugas sebagai supervisor pendidikan khususnya bidang supervisi akademik dengan bidang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan. Tetapi dalam aspek evaluasi dan tindak lanjut program supervisi akademik kepala sekolah harus lebih ditingkatkan agar tingkat pencapaian dapat

⁶⁰ Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cetakan I), 122.

⁶¹ Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Cetakan I), 125.

lebih efektif seperti yang diharapkan.⁶² Persamaannya yaitu efektivitas peran kepala sekolah sebagai supervisor perbedaannya ada pada supervisi akademik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Yuliana yang berjudul “Peranan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Kematangan Profesional Guru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan ketrampilan dan profesional guru. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam ketrampilan keprofesional guru. Penelitian ini sama-sama peranan kepala sekolah. Perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif.⁶³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Udin S. Sa’ud yang berjudul “Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah”. Hasil penelitian ini yaitu pengembangan kebijakan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah sudah berjalan dengan baik. Karena dari hasil sudah uji yang dilakukan benar-benar ada pengaruh antara pengembangan kebijakan yang dibuat upaya meningkatkan mutu pendidikan sejalan dengan hal tersebut maka dapat dipahami apabila penyelenggara pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah.⁶⁴ Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Persamaannya yaitu kebijakan pendidikan, perbedaannya ada pada pengembangan dalam kerangka otonomi daerah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mada Sutapa yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan”. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pendidikan dalam perspektif pendidikan tergolong cukup baik dan berpengaruh.⁶⁵ Perbedaannya yaitu jenis penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian tersebut ada dua yaitu

⁶² Tri Widodo, *Efektivitas Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor* di SD N 1 Wonosobo, SD N 5 Wonosobo, SD N 6 Wonosobo, Skripsi, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, 2014.

⁶³ Lia Yuliana, *Peranan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Kematangan Profesional Guru*, Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 2, 2007.

⁶⁴ Udin S. Sa’ud, *Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jurnal Edukasi, Volume 2, No. 2, 2016.

⁶⁵ Mada Sutapa, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 2, 2008.

kebijakan pendidikan dan perspektif pendidikan . sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dan penelitian penulis hanya ada satu. Namun adapun persamaannya yaitu dari penelitian sama-sama kebijakan pendidikan.

C. Kerangka Berfikir

Guru merupakan salah satu komponen yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran di sekolah, oleh karena itu guru dituntut selalu meningkatkan potensi profesional sebagai pengajar. Dengan adanya peningkatan kompetensi profesional guru maka akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi yang dimaksud yaitu meliputi kemampuan memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran. Peningkatan kompetensi profesional guru dapat dilakukan secara internal melalui usaha dari guru itu sendiri maupun secara eksternal yaitu melalui bantuan kepala sekolah. Dengan adanya keterbatasan untuk meningkatkan kompetensi profesional tersebut maka peran bantuan kepala sekolah sangatlah diperlukan.

Kompetensi supervisi tersebut meliputi merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu melalui peran kepala sekolah sebagai supervisor. Peran kepala sekolah sebagai supervisor diantaranya yaitu dengan membantu guru merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Peran kepala sekolah sebagai supervisor apabila dilakukan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesional guru, namun sebaliknya apabila peran kepala sekolah sebagai supervisor dilakukan dengan tidak optimal maka kompetensi profesional guru akan menurun.

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

